



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025**

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DINAS SOSIAL

Jalan Raja Johannes Hutabarat Tarutung 22411 Provinsi Sumatera Utara

Telepon +62821-6214-0638, Faximile. -

Post-el: dinsos@taputkab.go.id Laman : <http://www.dinsos.taputkab.go.id>;

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial perlu disusun Rencana Kerja Dinas Sosial;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II

Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;

17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019;
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09);

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025**

Pasal 1

1. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Tapanuli Utara;
2. Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan

pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2025.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD Tahun 2024 Semester I (Triwulan I).
- 2.2. Analisis Pelayanan Kinerja OPD.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD.
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya atau membutuhkan penyesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
pada tanggal : 2024

KEPALA DINAS,



Drs. DENNY SIMAMORA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670909 199703 1 002

DAFTAR ISI

SK	1
DAFTAR ISI	9
DAFTAR LAMPIRAN	--
BAB I PENDAHULUAN.....	10
1.1. Latar Belakang	10
1.2 Landasan Hukum.....	11
1.3 Maksud dan Tujuan	15
1.4 Sistematika Penulisan	16
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	22
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD Tahun 2024.....	22
2.2 Analisis Pelayanan Kinerja OPD	30
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	40
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	42
3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD.....	45
3.3 Program dan Kegiatan	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	48
BAB V PENUTUP	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 ini adalah salah satu Dokumen Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun Anggaran 2025, yang isinya memuat program dan kegiatan pembangunan bidang sosial, yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tapanuli Utara. Renja ini adalah merupakan pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Disamping itu dijadikan sebagai Pedoman adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan-Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan pada Pasal 27 bahwa SKPD menyusun Renja SKPD dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara RPJPD, RPJMD, dan RKPD

16. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10

Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025.

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Penjabaran dari program-program yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis ke dalam Rencana Tahunan.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan tahunan untuk mencapai sasaran organisasi;

3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan kedudukan Renja terhadap dokumen perencanaan lainnya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.4. Sistematika Penulisan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Renja.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU (Tabel TC-29)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD.

Memuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Perkiraan capaian Tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi Program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD disajikan dalam bentuk tabel.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD (Tabel TC.30)

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Dan jika OPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur kinerja dan indikator kinerja yang akan diuji maka setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Memuat tentang:

- Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD.
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.
- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program

dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel TC-31)

Memuat tentang :

- Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel TC-32)

Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Pada penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dibuat deskripsi yang disajikan,

sebagai berikut: (1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; (2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN (PD) (Tabel TC-33)

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3. Program dan Kegiatan

Memuat penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian MDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir dan sebagainya
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Rencana Program ini disajikan dengan bentuk tabel.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V. PENUTUP

Uraian penutup

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD Tahun 2023.

Merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

OPD Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

TABEL II.1
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI SEMESTER
II TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 (Semester II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3		4	7		12 = 8 + 9 + 10 + 11		15=12/7 x 100%		16

1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.848.831.285					
2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.869.500					
3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	4.000.000	6	3.877.550	100%	96,94%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	5.000.000	1	5.000.000	100%	100,00%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
5		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	16.869.500	12	16.868.000	75%	81,75%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
6		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.180.335.225		397.572.072		18,23%	
7		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	2.136.243.625	24	1.761.843.636	100%	82,47%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
8		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	39.591.600	12	39.352.670	75%	99,40%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
9		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	4.500.000	1	4.500.000	100,00 %	100,00%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
10		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		55.843.200		46.293.000		82,90%	

11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	55.843.200	10	53.493.000	111%	95,79%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
12		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-	0	-		0,00%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
13		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-	0	-		0,00%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
14		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		172.245.200		26.963.005		15,65%	
15		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3.420.000	12	3.420.000	100%	100,00%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
16		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	31.679.800	12	20.162.194	100%	63,64%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
17		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	137.145.400	12	136.899.980	100,00 %	99,82%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
18		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		64.179.460		17.192.000		26,79%	
19		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	40.169.860	5	40.106.560	100,00 %	99,84%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
20		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	7.093.900	9	7.093.000	44,44 %	99,99%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara

21		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	8.535.700	1	8.261.300	100%	96,79%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
22		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27	8.380.000	27	8.380.000	48,15 %	100,00%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
23		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		350.358.700		78.889.490		22,52%	
24		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	9.599.700	12	9.599.700	100,00 %	100,00%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
25		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	44.457.000	12	39.487.660	50,00 %	88,82%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
26		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	32.998.700	12	32.990.500	100,00 %	99,98%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
27		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	27.412.600	12	27.407.600	100,00 %	99,98%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
28		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	329	228.840.000	329	228.546.180	96,05 %	99,87%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
29		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	-	0	-			Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
30		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	7.050.700	9	7.050.700	75,00 %	100,00%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara

31	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan kelembagaan yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		752.916.200		3.025.000		0,40%	
32		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		752.916.200		3.025.000		0,40%	
33		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11	752.916.200	11	749.416.375	100,00 %	99,54%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
34	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				290.473.500		-		0,00%	
35		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			102.979.400		-		0,00%	
36		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6	5.108.000	6	5.048.000	100,00 %	98,83%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
37		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	0	-		0,00%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
38		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	0	-		0,00%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
39		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	0	-		0,00%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara

40		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40	84.900.000	40	84.380.000	117,50 %	99,39%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
41		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50	12.971.400	50	12.879.125	100,00 %	99,29%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
42		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			187.494.100		-		0,00%	
43		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	46	45.255.000	36	44.530.000	82,86 %	98,40%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
44		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	43	82.487.400	40	80.072.500	80,00 %	97,07%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
45		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	0	-	0	-		0,00%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
46		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	6	7.000.000	6	6.890.000	0,00%	0,00%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
47		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	4.444.900	5	4.364.000	100,00 %	98,18%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
48		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10	39.899.800	8	39.001.800	80,00 %	97,75%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara

49		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	8.407.000	5	8.401.600,00	100,00 %	100,00%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
50	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Fakir Miskin dan orang tak mampu Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani						1,64%	
51		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan Data Yang Valid						1,64%	
52		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	-	-				0,00%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
53		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	23496	196.999.900	213695	189.005.616,00	100,0 %	95,94%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
54		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14783	230.000.000	2920	216.521.005,00	100,0 %	94,14%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
55		Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendampingan Hidup Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19	-						0,00%	
56		Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendampingan Hidup Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 (bantuan sosial barang)	berkurangnya beban hidup terdampak Covid-19						0,00%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
57		Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendampingan Hidup Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 (BLT)	-						0,00%	

58		Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendampingan Hidup Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 (BLT)	berkurangnya beban hidup terdampak Covid-19						0,00%	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara
59	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana yang tertangani						4,58%	5
60		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terlindunginya Korban bencana						0,00%	
61		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	507	279.999.800	445	269.513.900	87,77 %	96,26%	
62		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-		35.000.000		14.418.000		41,19%	0
63		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15	35.000.000	15	34.842.900	100,00 %	99,55%	213695
64	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten		82.906.900		-		0,00%	2920
65		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten		82.906.900		-		0,00%	
66		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	76.906.900	1	76.319.400	100,00 %	99,24%	0
67		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	50	6.000.000	50	6.000.000	100,00 %	100,00%	

2.2. Analisis Pelayanan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Capaian Kinerja ini diulas dalam 2 hal yaitu:

- a. Capaian Kinerja atas setiap sasaran strategis pada setiap Program Kerja.
- b. Capaian Kinerja Kebijakan Program yaitu menggambarkan capaian kinerja seluruh indikator kinerja yang ada.

Indikator yang dikaji adalah Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang pelayanan:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan LAN yaitu SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 maka digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- Capaian Kinerja dengan nilai 85 s/d 100 dikategorikan “Sangat Berhasil”

- Capaian Kinerja dengan nilai 70 s/d 84 dikategorikan “berhasil”
- Capaian Kinerja dengan nilai 55 s/d 69 dikategorikan “cukup berhasil”
- Capaian Kinerja dengan nilai dibawah 55 dikategorikan “tidak berhasil”

Penilaian terhadap Evaluasi Kinerja ini akan diperoleh berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan capaian kinerja yang telah dinilai maka berikut ini adalah tabel keberhasilan pelaksanaan setiap kegiatan berdasarkan program / kegiatan, sbb:

Tabel II.2
Analisis Pelayanan Kinerja

No	Program/Kegiatan		Target Renstra PD Pada Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2023			Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	3		5			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13 = 12 + 6			14 = 13/5 x 100%			15
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	dokumen	12,000,000	0	dokumen	0.00	12	dokumen	11,795,050	85.71%	dokumen	98.29%	Dinsos
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	18,862,300	0	Dokumen	0.00	3	Dokumen	13,316,300	75.00%	Dokumen	70.60%	Dinsos
5		Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	12	laporan	16,868,000	3	Laporan	681,000.00	15	laporan	17,549,000	125.00%	laporan	104.04%	Dinsos
6		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													

7		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	96	orang/bulan	9,936,496,800	19	orang/bulan	373,202,087.00	67	orang/bulan	6,268,510,766	69.79%	orang/bulan	63.09%	Dinsos
8		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	Dokumen	15,366,400	3	Dokumen	6,598,600.00	32	Dokumen	119,726,320	66.67%	Dokumen	779.14%	Dinsos
9		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	18,000,000	0	Dokumen	0.00	4	Laporan	13,228,900	100.00%	Laporan	73.49%	Dinsos
10		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
11		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	Paket	46,758,600	0	Paket	0.00	14	Paket	32,724,400	350.00%	Paket	69.99%	Dinsos
12		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Paket	181,284,200	0	Paket	0.00	14	Paket	129,341,560	350.00%	Paket	71.35%	Dinsos
13		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Paket	111,753,609	0	Paket	0.00	14	Paket	83,737,500	350.00%	Paket	74.93%	Dinsos
14		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4	Paket	117,798,400	3	Paket	2,850,000.00	17	Paket	96,598,000	425.00%	Paket	82.00%	Dinsos
15		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	7,050,700	3	Laporan	2,500,000.00	15	laporan	9,550,700	125.00%	Laporan	135.46%	Dinsos
16		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	620,811,200	113	Laporan	28,427,000.00	466	Laporan	681,916,980	970.83%	Laporan	109.84%	Dinsos
17		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Paket	5,345,400	0	Paket	0.00	1	Paket	5,335,000	100.00%	Paket	99.81%	Dinsos
18		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													

19		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28	Unit	47,788,300	0	Unit	0.00	17	Unit	134,760,700	60.71%	Unit	282.00%	Dinsos
20		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Unit	400,000,000	0	Unit	0.00	2	Unit	393,277,000	100.00%	Unit	98.32%	Dinsos
21		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7	Unit	70,034,700	0	Unit	0.00	3	Unit	50,970,000	42.86%	Unit	72.78%	Dinsos
22		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
23		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan	15,450,000	0	Laporan	0.00	36	Laporan	11,440,000	75.00%	Laporan	74.05%	Dinsos
24		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	Laporan	64,724,500	0	Laporan	1,463,700.00	36	Laporan	49,195,929	75.00%	Laporan	76.01%	Dinsos
25		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	Laporan	362,828,000	3	Laporan	23,000,000.00	39	Laporan	340,727,980	81.25%	Laporan	93.91%	Dinsos
26		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
27		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18	Unit	146,177,100	1	Unit	4,669,000.00	12	Unit	116,955,310	66.67%	Unit	80.01%	Dinsos
28		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24	Unit	36,205,700	10	Unit	5,000,000.00	31	Unit	33,538,700	129.17%	Unit	92.63%	Dinsos
29		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	50,609,600	0	Unit	0.00	3	Unit	19,742,400	300.00%	Unit	39.01%	Dinsos

30		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24	Unit	40,900,000	0	Unit	0.00	39	Unit	31,891,750	162.50%	Unit	77.97%	Dinsos
31	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL														
32		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota													
33		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				0	Orang	0.00							
34		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	44	Lembaga	736,499,800	1	Lembaga	3,420,000.00	34	Lembaga	1,334,283,175	77.27%	Lembaga	181.17%	Dinsos
35	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														
36		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial													
37		Penyediaan Permakanan				0		0.00							
38		Penyediaan Sandang				0		0.00							
39		Penyediaan Alat Bantu	40	orang	84,380,000	0	Orang	0.00	40	Orang	84,380,000	100.00%	Orang	100.00%	Dinsos

40		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	141	Orang	234,346,250	0	Orang	0.00	127	Orang	195,293,800	90.07%	Orang	83.34%	Dinsos
41		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				0		0.00							
42		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	50	Orang	12,879,125	0	Orang	0.00	50	Orang	12,879,125	100.00%	Orang	100.00%	Dinsos
43		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				0		0.00							
44		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	12	Orang	6,290,400			0.00	12	Orang	21,761,600	100.00%	Orang	345.95%	Dinsos
45		Pemberian Layanan Kedaruratan	10	Orang	5,700,000			0.00	10	Orang	15,070,000	100.00%	Orang	264.39%	Dinsos
46		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10	Orang	5,700,000	0	Orang	0.00	10	Orang	5,630,000	100.00%	Orang	98.77%	Dinsos
47		Pemberian Layanan Rujukan	12	Orang	33,598,900	0	Orang	0.00	12	Orang	33,354,800	100.00%	Orang	99.27%	Dinsos
48		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial													
49		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				0		0							
50		Pemberian Layanan Kedaruratan	6	Orang	6,890,000	0	Orang	0.00	6	orang	6,890,000	100.00%			
51		Penyediaan Permakanan				0		0.00							

52		Penyediaan Sandang				0		0.00							
53		Penyediaan Alat Bantu	156	Orang	302,000,000	0	Orang	0.00	117	Orang	199,280,000	75.00%	Orang	65.99%	Dinsos
54		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti				0		0.00							
55		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	190	Orang	140,000,000	0	Orang	0.00	102	Orang	133,728,300	53.68%	Orang	95.52%	Dinsos
56		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA				0		0.00							
57		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				0		0.00							
58		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5	Orang	4,364,000	0	Orang	0.00	5	Orang	4,364,000	100.00%	Orang	100.00%	Dinsos
59		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10	Orang	39,001,800	0	Orang	0.00	10	Orang	39,001,800	100.00%	Orang	100.00%	Dinsos
60		Pemberian Layanan Rujukan	5	Orang	8,401,600	0	Orang	0.00	5	Orang	8,401,600	100.00%	Orang	100.00%	Dinsos
61		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2	Orang	40,000,000			0.00	0	Orang	-	0.00%	Orang	0.00%	Dinsos
62		Penanganan Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis													
63		Penanganan Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	1	Org	2,800,000		Org	0.00	1	Org	2,800,000	100.00%	Org	100.00%	Dinsos

64	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
65		Pemeliharaan Anak-anak Terlantar													
66		Penjangkauan Anak-anak Terlantar				0		0.00							
67		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
68		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2	Orang	44,999,800	0	Orang	0.00	2	Orang	34,939,800	100.00%	Orang	77.64%	Dinsos
69		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	93145	Keluarga	561,071,100	0	Keluarga	0.00	2577 06	Keluarga	574,957,316	276.67%	Keluarga	102.47%	Dinsos
70		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	58197	Keluarga	2,359,432,600	0	Keluarga	0.00	4621 4	Keluarga	4,776,471,241	79.41%	Keluarga	202.44%	Dinsos
71		Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendampingan Hidup Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19													
72		Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendampingan Hidup Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 (bantuan sosial barang)	5890	org	3,378,580,000	0	org	0.00	5890	org	3,008,158,250	100.00%	org	89.04%	Dinsos
73		Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendampingan Hidup Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 (BLT)													
74		Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendampingan Hidup Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 (BLT)	660	kk	396,000,000	0	kk	0.00	660	kk	396,000,000	100.00%	kk	100.00%	Dinsos

75	PROGRAM PENANGANAN BENCANA														
76		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota													
77		Penyediaan Makanan	1032	Orang	593,403,886	0	Orang	0.00	380	Orang	1,172,633,320	36.82%	Orang	197.61%	Dinsos
78		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota													
79		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	60	Orang	159,185,000	0	Orang	0.00	30	Orang	79,937,462	50.00%	Orang	50.22%	Dinsos
80	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN														
81		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota													
82		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4	dokumen	75,759,600	0	dokumen	0.00	2	dokumen	119,867,700	50.00%	dokumen	158.22%	Dinsos
83		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100	makam	21,978,200	0	makam	5,428,000.00	26	makam	19,371,500	26.00%	makam	88.14%	Dinsos

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Adapun sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara antara lain:

1. Data PMKS yang kurang akurat,
2. Belum tersedianya Pusat Kesejahteraan Sosial,
3. Minimnya ketersediaan logistic bencana,
4. Minimnya sarana prasarana,
5. Rendahnya kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),
6. Terbatasnya dukungan operasional terhadap PSKS

Berdasarkan kajian yang dilakukan, Isu-isu strategis dalam kinerja pelayanan Dinas Sosial adalah:

”Masih rendahnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”.

2.4. Riview terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan panduan Rencana Kerja Dinas Sosial kabupaten Tapanuli Utara yang tertuang dalam Program Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara.

Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara bukan semata-mata memberikan bantuan kepada masyarakat PMKS namun juga berupaya memberikan dorongan agar penyandang PMKS keluar dari permasalahan dan membina masyarakat PMKS untuk menumbuhkembangkan kemampuan dan partisipasi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan yang akan diwujudkan serta sekaligus dapat memberikan fokus terhadap Program Kerja yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Pelayanan Bantuan Sosial dan Bencana Alam
3. Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Sosial
4. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan

Dari uraian, yang menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi antara lain :

1. Penanganan terhadap PMKS selama ini telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada Dinas Sosial, tetapi belum secara keseluruhan, untuk ini sangatlah diperlukan lagi kegiatan-kegiatan Penangan PMKS.
2. Bantuan Sosial dan Bencana Alam akan diupayakan tepat waktu dan tepat sasaran.
3. Lembaga-lembaga sosial yang ada selama ini masih kurang aktif dalam membantu penanganan masalah sosial di Tapanuli Utara, sehingga sangat diperlukan pembinaan kepada lembaga sosial.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 dijelaskan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

1. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab;
2. Kecacatan, yaitu hilang / terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
3. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religious, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat.
4. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka

mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau

5. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara selaku bagian dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meliputi :

1. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2. Perlindungan dan Jaminan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial dan merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
3. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara merupakan tujuan dan sasaran dari target Renstra 2025-2026 :

Tujuan	: Meningkatkan kualitas pelayanan Publik
Indikator Tujuan	: Indeks kepuasan masyarakat.
Strategi	: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sasaran	: 1. Meningkatkan penanganan PMKS 2. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja
Indikator Sasaran:	1. Persentase PMKS yang ditangani. 2. Hasil Evaluasi Akip.
Formula	: 1. $\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$ 2. Nilai.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka upaya menjawab dan mengatasi isu-isu strategis tersebut di atas serta melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai OPD, Dinas Sosial telah merencanakan program, kegiatan dan pendanaan yang disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Hal-hal yang menjadi landasan penetapan program kerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

1. Memperhatikan tugas pokok dan fungsi ;

2. Memperhatikan program kerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Mempertimbangkan kemampuan anggaran yang tersedia ;
4. Memperhatikan skala prioritas yang menunjang visi dan misi.

Program kerja yang dimaksud terdiri dari 6 Program,14 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2 Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3 Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
03	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Penyediaan Permakanan
				2	Penyediaan Sandang
				3	Penyediaan Alat Bantu
				4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
				6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
				7	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				8	Pemberian Layanan Kedaruratan
				9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				10	Pemberian Layanan Rujukan
04	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
05	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Makanan
06	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
				2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Tahun Anggaran Tahun 2025 adalah Sebagai berikut:

Tabel IV.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						DINAS SOSIAL			2.962.449.821,00							0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.962.449.821,00							0,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			2.962.449.821,00							0,00	
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	100 persen	2.811.207.821,00						-	0,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan	100 Persen	30.999.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Dinas Sosial	-	0,00	
													6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA				

						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						PEMBANGUNAN				
	1	06	01	2.01	00001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	6.999.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	00006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	00007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	2.224.286.871,00		-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial	-	0,00	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2.179.699.271,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	40.587.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Laporan	4.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung	DANA TRANSFER UMUM-	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL

						SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM							
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	289.960.150,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial	-	0,00	
	1	06	01	2.06	00001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.998.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06	00002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.999.150,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06	00003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
						Jumlah Paket Peralatan	1 Paket	35.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara,	DANA TRANSFER	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL	

							Rumah Tangga yang Disediakan			Tarutung , Semua Kel/Desa	UMUM- DANA ALOKAS I UMUM		yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN				
	1	06	01	2.06	0 0 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.172.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung , Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0 0 0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung , Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0 0 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	725 Laporan	181.790.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung , Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	29.736.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Dinas Sosial	-	0,00	
	1	06	01	2.07	0 0 1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	29.736.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	173.478.400,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Dinas Sosial	-	0,00	
	1	06	01	2.08	00001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.08	00002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	31.748.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.08	00004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	139.730.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	62.745.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial	-	0,00	
	1	06	01	2.09	00001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	45.989.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	00006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	11.767.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	00009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	4.989.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS dan Kelembagaan yang diberdayakan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	80 persen	49.999.000,00						-	0,00	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/	4 Lembaga 15 Orang	49.999.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	0,00	

						Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota										
	1	06	02	2.03	00002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota										
						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	00004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota										
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lembaga	39.999.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		0,00	DINAS SOSIAL
3	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Diluar Panti Sosial	100 Persen	51.243.000,00					-	0,00	

						yang ditangani											
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhi nya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	93 Orang	51.243.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	0,00	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan											
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten /Kota		15 Orang	2.940.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar		0,00	DINAS SOSIAL

											, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas		Panti Sosial			
	1	06	04	2.01	00002	Penyediaan Sandang										
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten /Kota	10 Orang	4.950.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan , Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	00003	Penyediaan Alat Bantu										

						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten /Kota	8 Orang	9.950.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	00004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga									
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota	3 Orang	1.970.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	0,00	DINAS SOSIAL

											(Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas					
	1	06	04	2.01	00005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial										
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten /Kota	20 Orang	10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	00006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat										

						Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	20 Orang	10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	00008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten /Kota	10 Orang	1.920.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	0,00	DINAS SOSIAL

											Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas					
	1	06	04	2.01	00010	Pemberian Layanan Kedaruratan										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten /Kota	3 Orang	1.970.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenakartan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	00011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga										

						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	920.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan									
						Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	6.623.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	0,00	DINAS SOSIAL

												Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas					
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhi nya kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial		0,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	0,00	
	1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan											

						Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten /Kota	2400 Orang	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Perumahan									
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten /Kota	24 Orang	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	0,00	DINAS SOSIAL

[illegible]

						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	00006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti									
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	0,00	DINAS SOSIAL

											Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas					
	1	06	04	2.02	00007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial										
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	00008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA										

						Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	132 Orang	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	0,00	DINAS SOSIAL

											Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas					
	1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota	6 Orang	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga										

						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota	7 Orang	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan									
						Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten /Kota	6 Orang	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	0,00	DINAS SOSIAL

											Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas						
4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin, Orang Tidak Mampu, serta Anak-anak terlantar yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	35 persen	10.000.000,00						-	0,00	
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Penjangkauan, Rujukan dan Pemantauan Pemeliharaan Anak terlantar	7 orang	0,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Anak-Anak Terlantar	-	0,00	
	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar											
						Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten /Kota		20 Orang	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Anak-Anak Terlantar		0,00	DINAS SOSIAL

											Kemiskinan						
	1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar											
							Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Anak-Anak Terlantar		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	20459 orang	10.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	0,00	
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											

						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten /Kota	 Keluarga	10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga										
						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota	0 Keluarga	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		0,00	DINAS SOSIAL
5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota yang Tertangani	50 Persen	25.000.000,00					-	0,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten	75 Orang	25.000.000,00		-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	-	0,00	

						/ Kota										
	1	06	06	2.01	00001	Penyediaan Makanan										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	0,00		-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Masyarakat Kabupaten/Kota	-	0,00	
	1	06	06	2.02	00002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana										
						Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	17 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Masyarakat Kabupaten/Kota		0,00	DINAS SOSIAL

							Kewenangan Kabupaten/ Kota										
6	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang dikelola	100 persen	15.000.000,00						-	0,00	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	1 unit	15.000.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	-	0,00	
	1	06	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											
						Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 6. PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota		0,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											

						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan nya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	50 Maka m	5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung , Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	6. PERCEPATA N CAPAIAN KINERJA PEMBANGU NAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota		0,00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H							2.962.449.821,00							0,00	

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara masih akan mengalami kehidupan yang cukup berat dikarenakan dampak dari tingginya bencana alam dan sosial yang terjadi serta munculnya masyarakat miskin baru dan rentan yang hampir berpengaruh di semua sektor. Situasi yang berat tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Sosial Tahun 2025 yang telah tersusun, memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Sosial itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Sosial dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.



Tarutung,

2024

KEPALA DINAS,

Drs. DENNY SIMAMORA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670909 199703 1 002

